



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PERSETUJUAN PENYERTAAN MODAL NEGARA PT HUTAMA KARYA (PERSERO)

Monika Suhayati

Analisis Legislatif Ahli Madya
monika.suhayati@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah mendapatkan persetujuan dari Komisi XI DPR RI pada 13 September 2023 untuk penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Hutama Karya (Persero) sebesar total Rp47,48 triliun yang terdiri atas PMN Tunai sebesar Rp28,884 triliun untuk pencairan di tahun 2023 dan Rp18,604 triliun untuk pencairan di tahun 2024. PMN ini bermanfaat demi berlanjutnya konstruksi Tol Kayu Agung-Palembang-Betung dan Bogor-Ciawi-Sukabumi serta Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap I.

Rencana penambahan PMN dalam APBN 2023 dan pemberian PMN dalam APBN 2024 kepada sejumlah BUMN, termasuk PT Hutama Karya (Persero) disampaikan Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada 12 September 2023. Menteri Keuangan meminta persetujuan DPR RI untuk PMN tunai dalam APBN 2023 kepada 5 BUMN yaitu PT Hutama Karya (Rp28,84 triliun), PT Perusahaan Listrik Negara (Rp10 triliun), PT Sarana Multigriya Finansial (Rp1,53 triliun), PT Len Industri (Rp1,75 triliun), dan Perum LPPNPI/Airnav Indonesia (Rp659,19 miliar).

Sri Mulyani menyampaikan latar belakang perlunya PMN bagi PT Hutama Karya (Persero), yaitu terdapat kesulitan penyelesaian ruas Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung oleh PT Waskita Sriwijaya Tol, kesulitan penyelesaian ruas Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi oleh PT Trans Jabar Tol, dan kebutuhan tambahan PMN untuk penyelesaian JTTS tahap I. Sedangkan urgensi PMN tersebut, yaitu ruas Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (dimiliki oleh PT Waskita Sriwijaya Tol) urgen untuk terhubung langsung dengan JTTS milik PT Hutama Karya (Persero) khususnya ruas Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung dan ruas Jalan Tol Betung-Tempino-Jambi. Sedangkan ruas Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi urgen untuk terhubung dengan Jalan Tol Jagorawi. Penyelesaian ini krusial untuk memperlancar arus transportasi dan meningkatkan efisiensi waktu tempuh serta biaya perjalanan. Menteri Keuangan menyampaikan rencana penggunaan PMN PT Hutama Karya (Persero), yaitu pembelian saham PT Waskita Sriwijaya Tol melalui penerbitan saham baru senilai Rp10 triliun, pembelian saham PT Trans Jabar Tol melalui penerbitan saham baru senilai Rp2,5 triliun, dan penyelesaian JTTS Tahap I dengan kebutuhan PMN sebesar Rp6,104 triliun.

PMN tunai pada tahun 2023 akan digunakan PT Hutama Karya (Persero) untuk memenuhi sebagian porsi ekuitas pada JTTS, yaitu melanjutkan pembiayaan 9 ruas sebagai berikut Tol Binjai-Pangkalan Brandan (Rp1,096 triliun), Tol Sicincin-Padang (Rp5,339 triliun), Tol Kisaran-Indrapura (Rp1,176 triliun), Tol Pekanbaru-Koto Kampar (Rp797 miliar), Tol Kuala Tanjung-Pematang Siantar (Rp3,036 triliun), Tol Betung-Jambi (Rp7,285 triliun), Tol Taba Penanjung-Bengkulu (Rp266 miliar), Tol Rengat-Pekanbaru (Rp7,909 triliun), dan Tol Sigli-Banda Aceh (Rp1,98 triliun). Sedangkan PMN Tunai pada tahun 2024 akan digunakan untuk rencana penugasan baru PT Hutama Karya (Persero), yaitu Tol Kayu Agung-Palembang-Betung dengan alokasi Rp10 triliun dan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi sebesar Rp2,5 triliun.

Selain penugasan baru, PMN 2024 juga akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan JTTS pada 7 ruas, antara lain Binjai-Pangkalan Brandan (Rp1,294 triliun), Kisaran-Indrapura (Rp638 miliar), Kuala Tanjung Pematang Siantar (Rp194 miliar), Tapa Penanjung-Bengkulu (Rp478 miliar), Sigli-Banda Aceh (Rp1,008 triliun), Sicincin-Padang (Rp2,012 triliun) dan ruas Tol Pekanbaru-Koto Kampar (Rp480 miliar). PMN Tunai Tahun 2024 yang diperoleh PT Utama Karya (Persero) sebesar Rp18,604 triliun, menurut Wakil Menteri Badan Usaha Millik Negara Kartika Wirjoatmodjo, terbagi menjadi dua, yaitu sebesar Rp12,5 triliun untuk membantu PT Waskita Karya (Persero) Tbk menyelesaikan masalah keuangan dan pembangunan jalan tol serta Rp6,1 triliun untuk digunakan PT Utama Karya (Persero) mengerjakan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.

Atensi DPR

Penambahan PMN kepada PT Utama Karya (Persero) sebesar total Rp47,48 triliun dimaksudkan untuk keberlanjutan konstruksi Tol Kayu Agung-Palembang-Betung, Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi, dan JTTS tahap I. PMN bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penggunaannya harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) konstitusi yang menegaskan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, DPR RI khususnya Komisi XI dan Komisi VI perlu mengingatkan kepada Kementerian Keuangan dan PT Utama Karya (Persero) akan pentingnya tata kelola yang baik atau *good governance* dalam pengelolaan dan penggunaan dana PMN tersebut. Selain itu, Kementerian Keuangan perlu melakukan pengawasan dan evaluasi atas penggunaan PMN yang diberikan kepada PT Utama Karya (Persero).

Sumber

cnbcindonesia.com, 13 dan 14 September 2023;
dpr.go.id, 13 dan 14 September 2023;
kemenkeu.go.id, 12 September 2023; dan
kompas.com, 15 September 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023